

## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 14 TAHUN 2021

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

### Menimbang

- a. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Perubahan Program Pembentukan Perda Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5568);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 7. Peraturan Geburnur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur:
- 8. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.

- Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 188/1738/013.2/2021 Perihal Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 September 2021 dengan acara Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Pembentukan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

### **KESATU**

Perubahan Pembentukan Program Peraturan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### **KEDUA**

: Perubahan Program Pembentukan Peraturan sebagaimana diktum KESATU merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

### **KETIGA**

Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Pemerintah dan Kabupaten Bojonegoro mengajukan dapat Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebgaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, karena alasan:

- 1. Mengalami keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- 2. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
- 3. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- 4. Akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
- 5. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEEMPAT

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun berkenaan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bojonegoro

Pada Tanggal : 14 September 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

IMAM SHOLIKIN

**Lampiran**: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2021

МО	JUDUL RAPERDA	JENIS RAPERDA			
		BARU	UBAH	CABUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1			Usulan DPRD (Pembahasan Lanjutan)
2	Raperda tentang Penyelenggaraan Hiburan	1			(Pembahasan dilanjutkan pada Propemperda 2022, diusulkan kembali oleh Pemkab Bojonegoro)
3	Raperda tentang Pengembangan Kawasan Industri	1			Usulan DPRD (Pembahasan Lanjutan)
4	Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	1			Usulan DPRD
5	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1			Usulan DPRD
6	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	1			Usulan DPRD
7	Raperda tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	1			Usulan DPRD
8	Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	1			Usulan DPRD
9	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1			Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro 2020-2040	1			Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang Pertanian	1			Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
12	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018- 2023		٨		Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020.		<b>\</b>		Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

NO	JUDUL RAPERDA	JENIS RAPERDA			
		BARU	UBAH	CABUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
14	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1			Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Merupakan Raperda wajib yang selalu dilakukan pembentukan setiap tahun anggaran
15	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	<b>V</b>			
16	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	<b>V</b>			
17.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1		Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
18.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha		<b>V</b>		Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
19.	Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		<b>\</b>		Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
20.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum		1		Usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

IMAM SHOLIKIN